ANALISIS KINERJA UPPD PROVINSI WILAYAH XXXI CIMAHI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT CIMAHI

Analysis Of UPPD Province Regional XXXI Cimahi Performance in Vehicle Tax Return in Creasing in Cimahi Samsat Office

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh :
ANDRI PRASETYO
21307049

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2010

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1), Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata baik materiil dan spirituil berdasarkan UUD 1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak, karena pajak merupakan pendapatan yang besar di dalam suatu negara. dengan berkembangnya suatu negara semakin banyak masyarakat yang maju dan meningkat dalam taraf hidup. disamping meningkatnya taraf hidup masyarakat semakin banyak masyarakat untuk membayar pajak kepada negara dan semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak.

Menurut Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, pendapatan yang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari pajak kendaraan bermotor, dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, sehingga pendapatan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli daerah yang dapat memberikan kemajuan daerah kota Cimahi baik dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .

Dan kinerja dalam UPPD khususnya para staf dan pegawai pada Unit Pelayanan Pajak Daerah sangatlah penting guna menjalankan dalam pengelolaan pajak atau pendapatan daerah. maka dari itu kinerja dalam kantor UPPD baik dari strategi atau pelayanan harus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pembayaran pajak. Dari kinerja UPPD tersebut Untuk meningkatkan pendapatan dalam pajak kendaraan bermotor Di antaranya dengan membenahi ruang pelayanan untuk wajib pajak. Selain ruang full AC dan bebas rokok, interior ruang pelayanan ditata seperti sebuah bank. Beberapa kursi busa disusun dengan rapi untuk kenyamanan wajib pajak. Dan dari situlah kinerja Pimpinan dan Staf karyawan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dalam meningkatakan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah tanggapan Karyawan atau Staf berdasakan hasil wawancara mengenai Kinerja pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa kinerja karyawan pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi adalah baik, sehingga penulis dapat disimpulkan kinerja Staf dan Karyawan pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dan dapat dipertanggung jawabkan, hal ini dilihat dari kemampuan Kinerja organisasi dalam mengatur setiap tugasnya.

1. Berdasarkan tabel 1 mengenai Aktifitas kinerja staf atau karyawan UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi berdasarkan tingkat inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja sebagian besar merasa puas atas kinerja dalam organisasi. Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja staf atau karyawan UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi mengenai inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja sangatlah baik.

2. Berdasarkan tingkat kedisiplinan dari tabel 1 Karyawan menganggap bahwa tingkat penerapan peraturan dalam kinerja dirasa cukup baik, namun masih ada yang melanggar, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat kedisiplinan karyawan kurang baik masih perlu peningkatan kedisiplinan dalam bekerja.
3. Berdasarkan tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja Sebagian besar merasa puas karena hubungan baik dapat terjalin antar karyawan, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja sangatlahlah baik dilihat dari kerjasama yang baik antara karyawan.
4. Berdasarkan tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi / reaksi terhadap tugas Reaksi karyawan cukup baik dalam menjalankan misi atau tugas organisasi, namun ditemukan masih ada target yang belum bisa dicapai, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi/reaksi terhadap tugas cukup baik tapi masih kurang sehingga masih ada target yang belum bisa dicapai.

Berikut ini adalah tanggapan Masyarakat atau Wajib Pajak berdasakan hasil wawancara mengenai Kinerja pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel 2 dan pengamatan penulis, fenomena yang terjadi di lapangan kenyataannya pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi belum mencapai hasil yang maksimal dibuktikan dengan tabel 2 dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mau dalam partisipasi pembayaran pajak kendaraan bermotor , hal tersebut terjadi dan disebabkan karena :

Kurangnya Informasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan kurangnya optimal dalam Pendapatan pajak Kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Cimahi. **(Sumber : Esti Buana, Sub Bagian Tata Usaha UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi).**

Mengingat setiap perusahaan/instansi memiliki kinerja yang merupakan peranan penting dalam menjalankan operasional perusahaan atau Instansi, kinerja karyawan atau staf juga harus segera ditangani pimpinan karena menyangkut citra kantor UPPD di mata masyarakat. Dan Sistem informasi dalam Organisasi Perusahaan atau Instansi sangatlah penting. Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe davis, Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Maka dari itu sistem informasi sangat penting pada kantor UPPD Propinsi Wilayah XXXI Cimahi Untung memberikan Informasi yang jelas bagi masyarakat untuk mempermudah dalam pembayaran pajak. (**Kristianti ST. 2006. Diklat Kuliah Perancangan Sistem Informasi).**

Berdasarkan fenomena di atas, serta mengingat pentingnya Kinerja dalam Instansi yang merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatakan pendapatan pajak kendaraan bermotor , maka diperlukan penelitian lebih jauh mengenai :

"**Analisis Kinerja UPPD Wilayah XXXI Cimahi Dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Cimahi".**

1.2 Identifikasi dan Rumusam Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka dapat di Identifikasikan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Kurangnya optimal dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Pada kantor UPPD XXXI Cimahi.
2. Bagaimana hambatan pada kinerja atau pelayanan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor.
3. Bagaimana Strategi Kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna diolah, dianalisis, tentang Kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan Pajak kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Mengetahui Kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi.
2. Mengetahui hambatan pada kinerja atau pelayanan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor.
3. Mengetahui Strategi Kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD XXXI Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Sektor Publik.

   Hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi ilmu Akuntansi Sektor Publik dalam bidang ilmu peningkatan pendapatan, terutama mengenai Kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.
2. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dilakukan kajian lebih dalam mengenai variabel penelitian yang sama.
3. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai kinerja dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah serta sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat dalam bangku kuliah dengan pelaksanaan dilapangan.
4. Bagi program studi yang bersangkutan

   Manfaat bagi program studi yaitu dapat menjadikan pertimbangan atau penilaian apakah mahasiswa sudah menguasai teori dalam kuliah dan mampu untuk diterapkan dalam dunia kerja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Bagi Pimpinan UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi Inspirasi pemikiran kepada UPPD XXXI Cimahi dalam pengambilan keputusan terkait dengan peningkatan kinerja karyawan dengan memperhitungkan kualitas dan kesuksesan dalam kinerja.
2. Bagi karyawan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan atau pengetahuan tentang pentingnya kinerja dalam meningkatkan suatu pendapatan dan memberikan motifasi bagi karyawan atau staf untuk lebih meningkatkan cara pemikirannya dalam bekerja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kinerja

2.I.I.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya (Rival 2008):308 :

2.1.1.2 Ukuran Kinerja

Ukuran kinerja dalam kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dapat dilihat dan diukur berdasarkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, dimana pendapatan dapat dicapai sesuai target maka menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang baik, dan sebaliknya jika pendapatan tidak sesuai target maka kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang kurang baik. Dalam ukuran kinerja pada kantor UPPD Provnsi Wilayah XXXI Cimahi dapat dilihat dalam pendapatan pajak kendaran bermotor ditunjukan dalam tabel berikut :

Dalam tabel diatas menunjukan ukuran kinerja yang baik dalam kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, dapat dilihat dari pendapatan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2006 – 2009 menunjukan peningkatan dari tahun ketahun dan pendapatan yang diperoleh melebihi target yang sudah ditetukan dari pemerintah pusat.

2.1.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja **(Robert L. Manthis dan John H. Jackson 2001)**

1. Kemampuan mereka
2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
4. Keberadaan pekerjaan yang dilakukan
5. Hubungan mereka dengan organisasi

Menurut Gibson mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Atribut Individu

Dengan adanya berbagai atribut yang melekat pada individu dan dapat membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor ini merupakan kecakapan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan terdiri dari :

a. Karakteristik demografi, misalnya : umur, jenis kelamin, dan lain-lain
b. Karakteristik kompetensi, misalnya : bakat, kecerdasan, kemampuan, Keterampilan, dan sebagainya
c. Karakteristik psikologi, misalnya : nilai-nilai yang dianut seperti sikap dan perilaku

2. Kemauan untuk bekerja

Dengan berbagai atribut yang melekat pada individu untuk menunjukan adanya kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi un tuk mencapai kinerja yang baik diperlukan usaha dan kemauan untuk bekerja keras, karena kemauan merupakan suatu kekuatan pada individu yang dapat memicu usaha kerja yang lebih terarah sdalam melakukan suatu pekerjaan.

3. Dukungan organisasi

Dalam mencapai tujuan karyawan yang tinggi diperlukan adanya dukungan atas kesempatan dari organisasi atau perusahaan, hal ini untuk mengantisipasi keterbatasan baik dari karyawan maupun dari perusahaan.misalnya : perlengkapan, peralatan dan kelengkapan kejelasan dalam memberikan informasi.

Dari beberapa pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja maka dapat disimpulkan bahwa motivasi, kecerdasan dan dukungan organisasi merupakan faktor-faktor yang penting dalam mempengaruhi kinerja agar mendapatkan hasil kerja yang baik.

2.1.1.4 Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya(Bambang Wahyudi 2002):101

Penilaian Kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan**(Henry Simamora 2004):338**

2.1.1.5 Manfaat Penilaian Kinerja

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :

1. Penyesuaian – penyesuaian kompensasi
2. Perbaikan kinerja
3. Kebutuhan latihan dan pengembangan
4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja
5. Untuk kepentingan penelitian pegawai
6. membantu diagnosis terhadap kesalahan pegawai

2.1.2 Pelayanan Publik

2.1.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan**(KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN 2003)**

2.1.2.2 Hakekat Pelayanan Publik

- Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik.
- Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.2.3 Asas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

- Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan publik harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- Pengaturan setiap bentuk pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.
- Mutu proses dan hasil pelayanan publik harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.3.1 Pengertian pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan langsung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan **(Waluyo 2004)**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum **(Rochmat Soemitro 2007):1**

Pengertian pajak menurut P.J.A Andriani menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran mum berhubungan langsung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan **(P.J.A Andriani 2007):3**

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.3.2 Pajak Daerah

Pajak yang diterima pemerintah daerah dari berbagai pajak yang dibayar dari masyarakat yang digunakan atau berfungsi sebagai pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo 2003):98

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Marihot P. Siahaan 2005):10

2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Daerah

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan du Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2000.
3. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001.
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001.
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.

2.1.3.4 Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

a. Sebagai tiang utama pertumbuhan otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
b. Sebagai sumber penerimaan atau dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas penguasaan kendaran bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor adalahoarang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor **(M.Suparmoko 2007):63**

2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaran bermotor tersebut. Nilai kendaran bermotor sesuai dengan harga pasar kendaran bermotor, ataudiperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaran bermotor, jenis kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu. Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen)dari nilai jual kendaraan bermotor.**(** M.Suparmoko.)

2.1.4.3 Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Setiap penyerahan kendaraan bermotor di daerah akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak yang berakibat pemindahan hak milik atau penguasaan yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah, lelang, dan sebagainya.
2. Penguasaan kendaraan bermotor yang dikuasai untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan oleh pribadi atau badan yang bukan pemiliknya dihitung sejak saat penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian dan sewa menyewa termasuk leasing.
3. Pemasukan kedaraan bermotor yang dimasukkan oleh kontraktor asing ke wilayah Provinsi Jawa Barat yang tidak di Re-eksport setelah proyek selesai.
4. Penyerahan kendaraan bermotor dari penasukan luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
   a. Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti sah;
   b. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
   c. Untuk diperdagangkan dengan tujuan pameran, penelitian dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
5. Perubahan bentuk kendaraan bermotor yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan;
6. Penggantian mesin kendaraan bermotor, baik mesin baru maupun mesin lama. (Esti Buana, Sub Bag Tata Usaha 2010)

2.1.4.4 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subyek pajak adalah :
   a. Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
   b. Untuk merubah bentuk dang anti mesin subyek pajaknya adalah yang memiliki kendaraan bermotor.
2. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksud adalah :

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan orang yamg menerima hibah.
b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya

2.1.4.5 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah setiap orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau pada saat pembelian kendaraan bermotor.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan pemerintah daerah merupakan tujuan yang berpusat pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan dalam tujuan daerah tersebut sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan tujuan diatas, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Disamping pemerintah daerah harus mempunyai dana atau modal yang besar pemrintah daerah harus mampu mengelola dana atau modal itu dengan baik sehingga dapat terealisasi dengan baik dalam pemakaiannnya. Dan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yaitu merupakan pendapatan asli daearah yang didalamnya terdapat beberapa pajak yaitu, dari pajak daerah itu sendiri misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak air, pajak BBNKB, dll. Dan dari pendapatan pajak yang menjadi pendapatan terbesar pemerintah daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dikarenakan semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan bermotor semakin banyak juga pendapatan pajak yang diterima pemerintah dari pajak kendaraan bermotor. Dan pendapatan pajak lainnya yang merupakan pendapatan daerah yaitu Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandi 2005)

)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan **(Ely Suhayati** dan **Siti kurnia Rahayu 2010):9**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerja sama dengan pihak ketiga **(H. Rozali Abdullah 2005): 144**

H. Rozali Abdullah menyatakan bahwa ;
"Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah (H. Rozali Abdullah 2005)

Dalam menunjang kelancarannya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah. Dan dari sumber pendapatan dari penerimaan pajak tersebut harus disertai dengan kinerja dan pengelolaan yang baik. Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu melaksanakan dan mengatur kinerja pegawai yang baik, misalnya dalam kantor pembayaran pajak kendaraan bermotor atau kantor samsat sebagai pegawai atau karyawan harus mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik dan

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembayaran pajak sehinnga penadapatan pajak yang diterima akan semakin meningkat. partisispasi masyarakat dalam pembayaran pajak akan mempercepat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dalam suatu daerah.

Pembangunan adalah titik perhatian bagi pemerintah dengan segala kegiatan dan berbgai tujuan. Pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan merata terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan diharapkan mampu pula dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, dimana aspek-aspek tersebut sebagai mata rantai yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam kelangsungan hidup bernegara.

Sedangkan pembangunan nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur juga merata material dan spiritual.

Sedangkan yang paling dominan sebagai sumber dana adalah sektor perpajakan dimana yang turut menentukan berlangsungnya pembangunan yang akan tercapai. Sedemikian pentingnya sehingga pihak pemerintah menaruh perhatian terhadap sektor perpajakan ini dengan adanya peraturan-peraturan yang diperbaharui ataupun adanya perundang-undangan yang baru.

Dan salah satu pajak yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak kendaraan bermotor, karena pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah. Karena di sektor pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif dan *reliable* tentang suatu hal variable tertentu **(Sugiyono 2004):13**

Objek Penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika di anggap perlu **(Husein Umar 2005):303**

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu **(Sugiyono 2009)**

Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum **(Sugiono 2009):29**

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data atau sampel sebagaimana adanya.

3.2.1 Desain Penelitian

(**Sugiyono 2008:18)** menjelaskan proses penelitian dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Sumber Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan Hipotesis
5. Metode Penelitian
6. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang dijaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Masalah

   Peneliti menentukan masalah-masalah sebagai fenomena untuk dasar penelitian. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu :

   a. Bagaimana Kinerja Pada kantor UPPD XXXI Cimahi.
   b. Bagaimana hambatan pada kinerja atau pelayanan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor.
   c. Bagaimana Strategi Kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD XXXI Cimahi.

2. Perumusan Masalah

   Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabanya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian akan mempengaruhi pelaksanaan tahap selanjutnya didalam tahap penelitian. Pada penelitian ini masalah-masalah dirumuskan melalui suatu pertanyaan, yang akan di uji dengan cara menguiji hipotesis.

3. Konsep dan teori yang relevan

   Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (hipotesis) maka, peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berfikir. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban smentara terhadap masalah penelitian (hipotesis).

4. Pengujian Hipotesis

   Jawaban terhadap rumusan masalah yanag baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah Analisis Kinerja UPPD XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaran Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

5. Metode Penelitian

   Untuk menguji hipotesis tersebut peneliti dapat memilih metode penelitian yang sesuai, pertimbangan ideal untuk memilih metode itu adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki. Sedangkan pertimbangan praktis adalah tersedianya dana, waktu, dan kemudahan yang lain. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan statistik deskriptif dan kuantitatif.

6. Kesimpulan

   Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian

mengenai pengaruh kredit bermasalah terhadap pendapatan, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

Variabel Independen (X).

Variabel independen adalah variabel yang tidak terikat oleh faktor-faktor lain, tetapi mempunyai peranan terhadap variabel lain. Variabel independen ini adalah pajak kendaraan bermotor.

Variabel independen (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat **(Sugiyono 2009):39**

Variabel, indikator, skala pengukuran yang digunakan untuk variabel X dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

3.2.3 Sumber Dan Teknik Penentuan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, di mana penulis memperoleh data yang disajikan oleh instansi. Misalnya; pajak kendaraan bermotor diperoleh dari kantor UPPD Wilayah XXXI Cimahi.

3.2.3.1 Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan **(Nur Indriantoro 2002)**

3.2.3.2 Teknik Penentuan Data

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan, seperti : buku-buku (seperti : Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Ekonomi Publik, dan sebagainya), dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Penelitian ini berguna untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis dalam membandingkan, membahas dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

2. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan :

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi. (**Sumber untuk memperoleh data dari Sub Bagian PKB/BBNKB)**
b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap data-data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap situasi serta kondisi yang dihadapi oleh perusahaan pada waktu penelitian berhubungan dengan masalah penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan. (**Sumber untuk memperoleh data tersebut dari Esti Buana, Sub Bagian Tata Usaha)**

IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Kinerja dan Hambatan dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

Kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang baik ditunjukan dalam penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dari tahun-ketahun mengalami peningkatan dan pendapatan yang diterima sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang sangat baik ditunjukan dengan tabel berikut :

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kinerja Pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Kinerja Merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam suatu organisasi dalam perusahaan. Menurut **Anwar Prabu Mangku Negara** (Tahun 2003:67)

Dan kinerja dapat dikatakan baik yaitu dimana kinerja tersebut mampu mendapatkan pendapatan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor peneliti melihat bahwa kinerja yang dilakukan pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor , Untuk mengetahui kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dapat dilihat dalam tabel 4.1 mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menunjukan kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

1. Tahun 2006 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 26.540.000.000; dan terealisasi menjadi Rp 28.554.536.150; dengan persentasi 124,18%, menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan.
2. Tahun 2007 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 28.000.000.000; dan terealisasi menjadi Rp 31.651,029.250; dengan persentasi 113,04%, menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan.
3. Tahun 2008 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 32.000.000.000; dan terealisasi menjadi Rp 35.776.000.000; dengan persentasi 110,24%, menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan
4. Tahun 2009 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 38.300.000.000; dan terealisasi menjadi Rp

39.771.491.850; dengan persentasi 103,84%, menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan.

Dari penerimaan diatas secara umum penerimaan dari pendapatan pajak kendaraan bermotor melebihi target menunjukan kinerja yang sangat baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, dapat dilihat dalam persentasi penerimaan sebagai berikut :

Tahun 2006 : 124,18%
Tahun 2007 : 113,04%
Tahun 2008 : 110,24%
Tahun 2009 : 103,84%

Dari persentasi penerimaan diatas yang menunjukkan kinerja yang paling baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi yaitu pada tahun 2006 dengan persentasi penerimaan sebesar 124,18%, disamping menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan penerimaan yang melebihi target, tetapi persentasi dalam penerimaan dari tahun-ketahun mengalami penurunan ditunjukkan dari persentasi penerimaan dari tahun 2006-2009, padahal pemilik kendaraan bermotor setiap tahun mengalami penungkatan. penurunan persentasi penerimaan dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal dapat disebabkan dari kinerja pegawai atau karyawan dalam aktifitas kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, dapat dilihat berdasarkan :

1. Tingkat inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja.
2. Tingkat penerapan kedisiplinan dalam bekerja.
3. Tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja.
4. Tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi / reaksi terhadap tugas.

Dan faktor eksternal dapat disebabkan karena kurangya kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurangnya partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.2.2 Hambatan

Banyak hambatan yang ada dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor baik dari segi pelayanan maupun lokasi masyarakat atau wajib pajak yang sangat jauh dari tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menghambat pelayanan atau kinerja dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Selain itu masyarakat atau wajib pajak juga kurang informasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.2.3 Analisis Strategi yang Dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Dari permasalahan atau hambatan yang ada dalam kinerja atau pelayanan pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor, adapun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi yaitu dengan adanya program Samsat Keliling atau Samsat online , samsat keliling atau samsat online merupakan bentuk implementasi program Mabes Polri di Polda Jabar. Layanan ini juga merupakan bentuk reformasi Polri. Jadi polisi tidak perlu lagi bersentuhan dengan uang, tetapi murni pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja atau pelayanan UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi akan lebih mudah dan efisien dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor akan terlaksana dengan baik dan maksimal. Selain mempermudah pelayanan pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Adanya samsat keliling dan samsat online juga mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu jauh-jauh datang untuk membayar kekantor pajak tetapi masyarakat atau wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui samsat

keliling atau samsat online yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor akan tercapai dengan baik. Apalagi setiap tahun mengalami peningkatan dalam pemakaian kendaraan bermotor semakin banyak juga peningkatan pendapatan yang diterima pemerintah dalam kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi. Dan untuk kurangnya informasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pemerintah memberikan informasi atau pembelajaran kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kesalahan dan masyarakat atau wajib pajak akan lebih berpartisipasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga kinerja dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi akan tercapai dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang sangat baik karena pendapatan yang dicapai sesuai dengan target yang ditentukan atau ditetapkan dan pelayanan kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dikatakan sangat baik karena dapat memberikan pelayanan pada masyarakat atau wajib pajak dalam mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi mampu mengatasi hambatan atau masalah yang menghambat dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan Strategi yang dilakukan oleh kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor dikatakan berhasil karena dapat mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling dan samsat online yang diberikan pemerintah sehingga pendapatan akan semakin meningkat.
3. Upaya yang dilakukan Pada kantor UPPD Provinsi Wialayah XXXI Cimahi dalam mengatasi hambatan untuk meningkatakan pendapatan pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan berasil, hal ini ditunjukkan masyrakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kinerja dan Pelayanan kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi harus mampu memberikan kepuasaan pada masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor baik dalam kinerjanya misalnya memberikan Kinerja yang baik ramah kepada wajib pajak dan dalam segi pelayanan misalnya ruang tunggu yang nyaman gedung yang baru, menambah loket pembayaran. Dan kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik dilihat dari penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang melebihi target yang ditentukan, maka kinerjanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan baik dari pihak perusahaan, sehingga pendapatan dari pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

2. Hambatan yang terjadi pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi disebabkan dari faktor Intern dan Ekstern, maka dari itu baik pihak pemerintah atau wajib pajak diberikan pengarahan secara jelas dan terperinci mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tidak akan terjadi hambatan dalam meningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
3. Strategi yang digunakan oleh kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi harus benar-benar dilaksanakan sehingga dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor dapat terealisasi dengan baik.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. 2004. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor*

Marihot P. Siahaan, 2005, *"Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*",Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, Jakarta

Mulyadi. 2005 , *Perpajakan* . Jakarta salemba Empat.

M. Suparmoko, 2002, "Ekonomi Publik", Andi , Yogyakarta

Perda. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2004 tentang *Pajak Kendaraan Bermotor.*

Perda Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 4 maret 2004 tentang *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah* (RPKD).

P.J.A. Andriani, 2007, "*Akuntansi Perpajakan*", Salemba Empat, Jakarta.

Rochmat Soemitro,2007, "*Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan*", Eresco Lembaga Pendidikan, Bandung.

Sugiyono, 2009, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD*", Alfabeta, Bandung.

Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu, 2010, "*Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*", Graha Ilmu, Yogyakarta.

UU Nomor 7 Tahun 2001, "*tentang Pajak Kendaraan Bermotor*".

Waluyo*. 2004 . Perpajakan Indonesia .* Jakarta Salemba Empat.

Tabel 1.1
Analisis Kinerja UPPD Provinsi XXXI Cimahi Dalam meningkatkan Pendapatan pajak Kendaraan bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Cimahi

No.	Aktifitas kinerja staf UPPD	%	Keterangan
1.	Tingkat inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja.	85 %	Sebagian besar merasa puas atas kinerja dalam organisasi.
2.	Tingkat penerapan kedisiplinan	75 %	Karyawan menganggap bahwa tingkat penerapan peraturan dalam kinerja dirasa cukup baik, namun masih ada yang melanggar.

3.	Tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja	75 %	Sebagian besar merasa puas karena hubungan baik dapat terjalin antar karyawan.
4.	Tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi / reaksi terhadap tugas.	65 %	Reaksi karyawan cukup baik dalam menjalankan misi atau tugas organisasi, namun ditemukan masih ada target yang belum bisa dicapai.

Sumber : karyawan atau staf kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

Tbel ini Terdapat dalam Teks Pada bagian 1 Pendahuluan Tentang Analisis Kinerja UPPD Provinsi XXXI Cimahi Dalam meningkatkan Pendapatan pajak Kendaraan bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Cimahi

Tabel 1.2
Pendapat masyarakat Tentang kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Cimahi

No.	Pendapat Masyarakat/wajib Pajak Tentang kinerja UPPD XXXI Cimahi	%	Keterangan
1.	**Pelayanan** Tingkat Pelayanan dan Kenyaman dalam Pembayaran pajak Kendaraan bermotor.	85 %	Hal ini bisa dilihat dari hasil Kinerja dan Pelayanan.
2.	**Sosialisasi** Pemberian Informasi Pada wajib pajak mengenai pembayaran pajak.	60 %	Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam Pembayaran pajak.
3.	**Pengetahuan kerja** Mampu dan mengetahui dalam penggunaan alat – alat kerja	70%	Sebagian besar dapat menggunakan walaupun masih memerlukan bantuan orang lain.
4.	**Kedisiplinan** Ketepatan karyawan dalam menjalankan Pekerjaanya.	60 %	Kurangya ketepatan Karyawan atau staf dalam bekerja.

5.	**Kehadiran** Kedisiplinan dalam kehadiran maupun terhadap waktu	60 %	Sebagian karyawan masih menganggap kurang karena masih banyaknya pelanggaran dalam waktu kerja.
6.	**Kerjasama** Kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja	80 %	Kerja sama antar karyawan atau staf sangat Kompak dalam menjalankan tugasnya.

Sumber : Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD XXXI Cimahi

Tabel ini Terdapat dalam Teks Pada bagian 1 Pendahuluan Tentang Pendapat masyarakat
Tentang kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi Dalam Meningkatkan Pendapatan
Pajak Kendaraan BermotorPada Kantor Bersama Samsat Cimahi.

Tabel 2.1

Tabel Pendapatan Pajak kendaraan Bermotor Pada

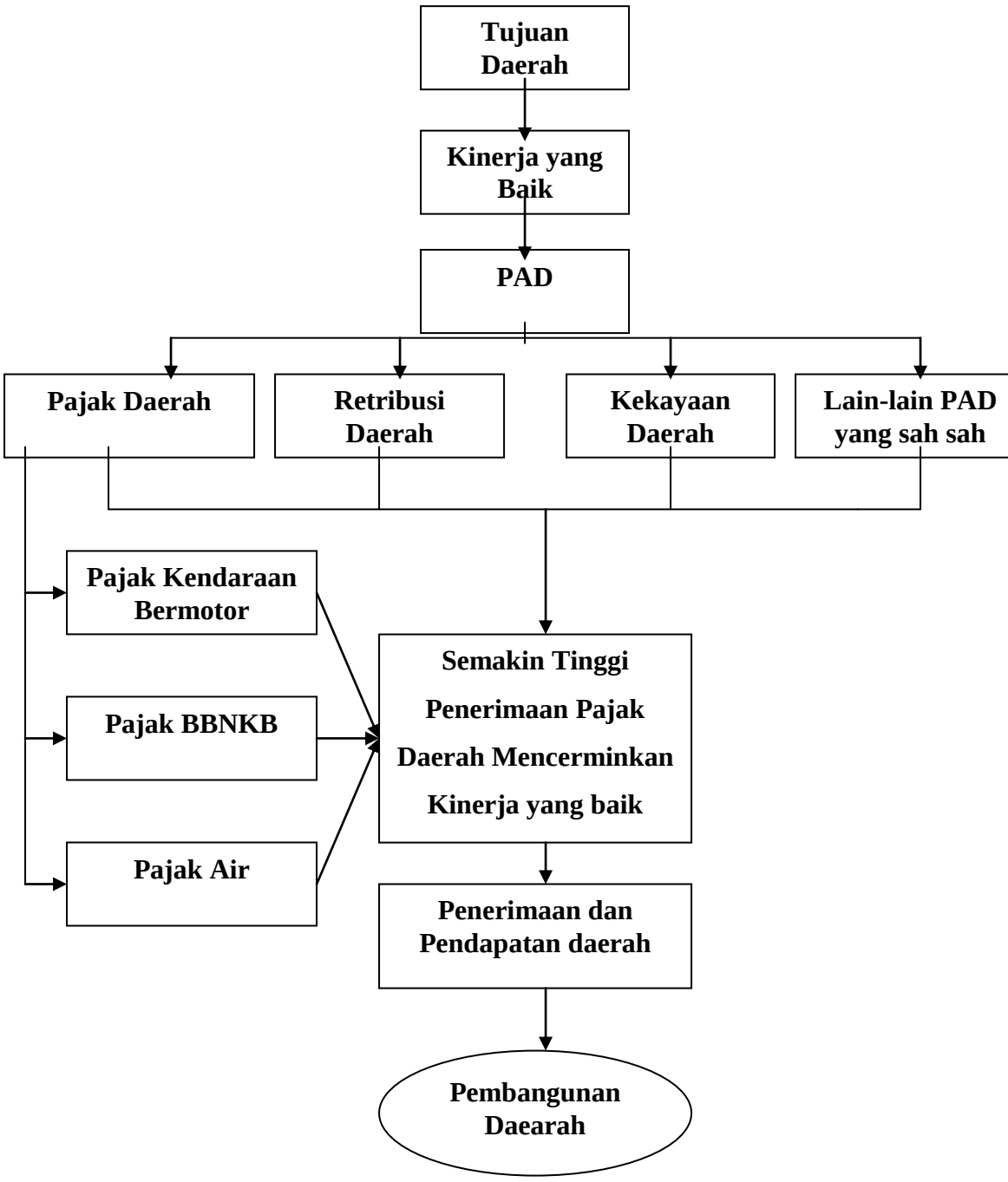
Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	%
PKB	2006	Rp 26,540,000,000	Rp 28,554,536,150	124,18%
PKB	2007	Rp 28,000,000,000	Rp 31,651,029,250	113,04%
PKB	2008	Rp 32,000,000,000	Rp 35,776,000,000	110,24%
PKB	2009	Rp 38,300,000,000	Rp 39,771,491,850	103,84%

Sumber: Sub Bag Tata Usaha kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi 2010

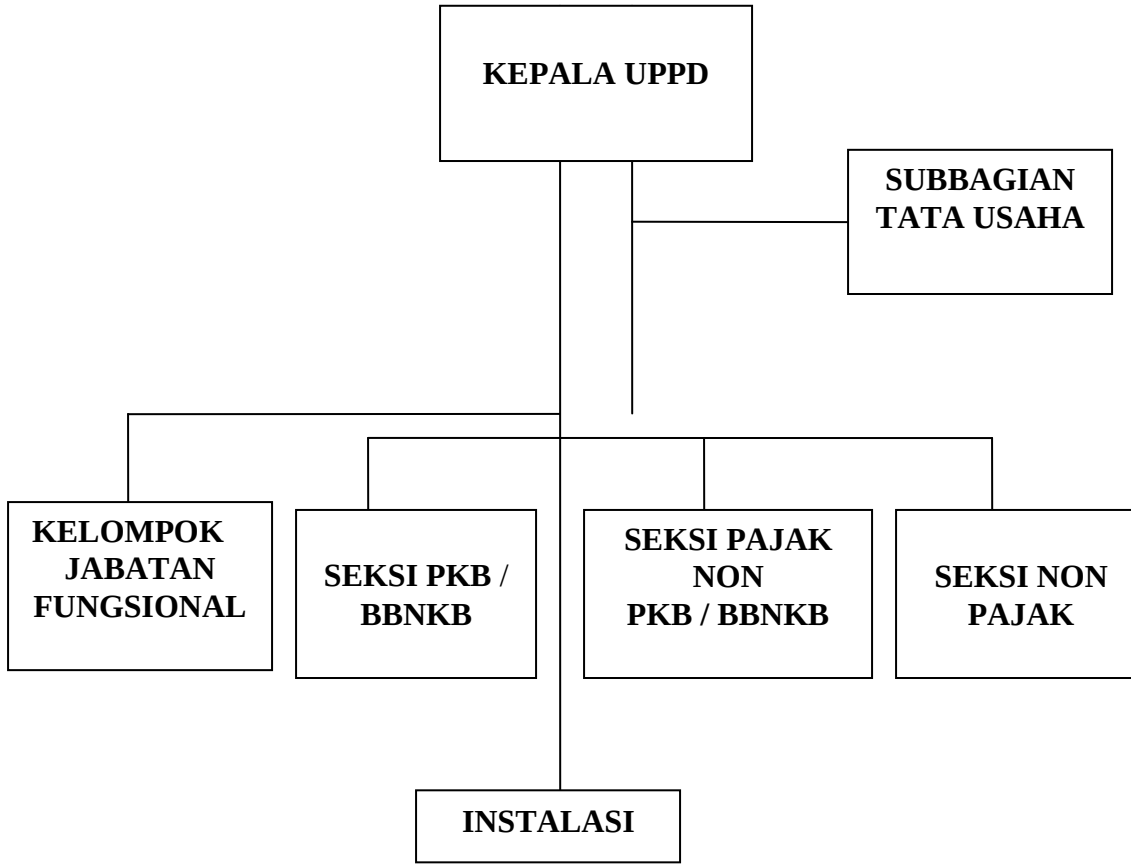
Tabel ini Terdapat dalam Teks Pada bagian 2 dan 4 ,Kajian Pustaka dan PembahasanTentang Pendapatan Pajak kendaraan Bermotor Pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Gambar Ini Terdapat dalan Teks bagian 2 Tentang Kerangka Pemikiran.

Gambar 4.1
Stuktur Organisasi



Gambar ini Terdapat Dalam Teks bagian IV Tentang Stuktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXI (Cimahi).